

ABSTRAK

Tugas dan pekerjaan notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dibawah tangan, Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 1874,1874 (a) dan 1880 KUHPerdata terhadap bukti surat dibawah tangan harus ada legalisasi dari pejabat umum yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses legalisasi yang dilakukan oleh notaris, untuk mengetahui tentang tanggung jawab notaris terhadap surat dibawah tangan yang dilegalisasi, untuk mengetahui sejauhmana kekuatan pembuktian surat dibawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Praktek legalisasi yang dilakukan oleh notaris dalam hal ini para pihak yang namanya tercantum dalam surat dan membubuhkan tanda tangannya dalam surat dibawah tangan tersebut tidak dapat lagi menyangkal bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui isi dari surat dibawah tangan tersebut, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tanda tangan dihadapan pejabat umum dalam hal ini adalah notaris yang bersangkutan dan dihadapan saksi. Tanggung jawab notaris terhadap surat dibawah tangan yang dilegalisasinya hanya sebatas mengenai kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak, bahwa yang bertanda tangan dalam surat dibawah tangan tersebut memang benar para pihak itu sendiri yang ada dalam perjanjian surat dibawah tangan itu bukan orang lain. Karena notaris harus menyaksikan langsung dan mencocokkan tanda identitas para pihak dengan menggunakan kartu tanda penduduk pada saat hari dan tanggal dimana surat itu dibuat.

Akibat hukum dalam pembuktian dipengadilan dengan alat bukti tulisan dalam hal ini surat dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila salah satu pihak tidak menyangkal tanda tangan dalam surat tersebut oleh karena itu surat dibawah tangan tersebut harus memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan oleh Undang-undang. Jika persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang itu dipenuhi maka kekuatan hukum pembuktian itu sangat menjadi pertimbangan utama hakim dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pokok perkara yang dipersidangkan di pengadilan (Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata)

Kata Kunci : Pembuktian, Surat Dibawah Tangan, Legalisasi

ABSTRACT

The duties and work of a notary as a public official are not limited to making authentic deeds but are also assigned to register and ratify documents under the hand.. Based on Articles 15 (2) 1874,1874 (a) and 1880 KUHPerdata, there must be legalization of evidence from an authorized public official. This study aims to determine the legalization process carried out by a notary, to find out about the responsibility of a notary to legalized underhand letters, to find out the extent of the power of proof of an underhand letter as evidence in the trial process in court.

This study uses a normative juridical research method. Normative juridical research is research conducted by reviewing applicable laws and regulations or applied to a particular legal problem.

Based on the results of the study, it can be seen that. The practice of legalization carried out by a notary in this case the parties whose names are listed in the letter and affixed their signatures in the letter under the hand can no longer deny that the parties or one of the parties do not know the contents of the letter. under the hand, because the contents have been read and explained in advance before the parties put their signatures before a public official in this case is the notary concerned and before the witness. The notary's responsibility for the legalized letter is only limited to the certainty of the date and signature of the parties, that it is true that the undersigned parties in the underhand letter agreement are not other people. Because the notary must witness firsthand and match the identity cards of the parties using the identity card on the day and date on which the letter was made.

The legal consequences in proving in court with written evidence in this case an underhand letter that has been legalized by a notary has perfect evidentiary power if one of the parties does not deny the signature in the letter, therefore the underhand letter must meet the authenticity requirements determined by law. If the requirements determined by the law are met, then the legal force of proof becomes the judge's main consideration in making decisions relating to the subject matter being tried in court (Pasal 1881 (2) KUHPerdata)

Keywords: Proof, Letter Under Hand, Legalization